

DRAFT FINAL  
18 Desember 2013  
SIANG



**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PENUTUPAN MASA SIDANG II  
TAHUN SIDANG 2013-2014**

**KAMIS, 19 DESEMBER 2013**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA  
2013**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**PIDATO KETUA DPR RI  
PADA RAPAT PARIPURNA DPR RI  
PENUTUPAN MASA SIDANG II  
TAHUN SIDANG 2013-2014**

**KAMIS, 19 DESEMBER 2013**

***Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh,***

**Salam Sejahtera bagi kita sekalian,**

**Yang kami hormati,**

- **Para Wakil Ketua DPR-RI,**
- **Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan,**
- **Para Anggota Dewan,**

Hari ini Dewan menutup Masa Sidang II Tahun Sidang 2013-2014 yang telah berjalan selama 24 hari kerja, dimulai sejak 18 November 2013. Pada Pidato Penutupan Masa Sidang II Tahun Sidang 2013-2014 ini, selaku Pimpinan Dewan, saya akan melaporkan kegiatan Dewan dalam melaksanakan tiga fungsi utama Dewan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib Dewan Pasal 218 ayat (2). Selama Masa Sidang yang relatif singkat ini, semua Alat Kelengkapan Dewan, khususnya Komisi-Komisi, Badan Legislasi, Panitia Khusus, BKSAP, Badan Anggaran, BAKN, BURT, dan Badan Kehormatan, telah bekerja efektif sesuai dengan kewenangan masing-masing.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, *alhamdulillah*, 6 (enam) RUU telah disetujui oleh DPR RI, yaitu RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, RUU tentang Desa, RUU tentang Perubahan Atas UU No. 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, RUU tentang Perindustrian,

RUU tentang Aparatur Sipil Negara, dan RUU tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Dewan masih menyisakan sekitar 30 (tiga puluh) RUU yang perlu dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang yang akan datang, karena semua RUU tersebut telah memasuki Pembicaraan Tingkat I, bahkan telah mengalami beberapa kali perpanjangan masa pembahasan. Dewan memiliki sisa waktu sampai dengan akhir Masa Bhakti 2009-2014, yaitu Masa Sidang III yang akan berjalan 36 hari kerja, dimulai 15 Januari sampai 6 Maret 2014 sebelum Masa Reses menghadapi Pemilu Legislatif, Masa Sidang IV dimulai 12 Mei sampai 10 Juli 2014, dan Masa Sidang I Tahun Sidang 2014-2015 yang akan berlangsung tanggal 16 Agustus sampai berakhirnya Masa Bhakti DPR 2009-2014. DPR hasil Pemilu 2014 akan dilantik pada 1 Oktober 2014. Dengan agenda tersebut, maka tidak bisa lain, kita harus benar-benar melakukan optimalisasi terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi Dewan, khususnya pelaksanaan fungsi legislasi. Harapan ini, juga kami tujukan kepada Pemerintah, karena kendala penyelesaian beberapa RUU seringkali juga datang dari pemerintah.

Kita tidak ingin kehilangan waktu dan energi dalam agenda legislasi ini, karena apabila RUU tidak diselesaikan pada periode ini, walaupun sudah memasuki Pembicaraan Tingkat I, maka DPR-RI hasil Pemilu 2014 dan Pemerintahan baru, akan membahasnya kembali sejak awal.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

RUU tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang ditangani Komisi II, antara lain mengatur tentang sanksi bagi aparat pemerintah yang terbukti memungut biaya kepada masyarakat, terkait pelayanan administrasi kependudukan seperti KTP, Kartu Keluarga, Akte Kelahiran, dan Surat Kematian. Segala pengurusan dan penerbitan dokumen kependudukan, tidak lagi dipungut biaya, yang merupakan implementasi dari Putusan MK. RUU ini merupakan tonggak bagi terwujudnya data kependudukan yang lebih baik, demi terwujudnya sistem administrasi kependudukan yang lebih praktis dan efisien.

RUU yang sangat penting, khususnya bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat pedesaan, sudah diselesaikan pada hari-hari terakhir menjelang penutupan sidang, yaitu RUU tentang Desa. RUU ini merupakan penjabaran dari pasal 18 ayat (7) dan pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, yang pada intinya memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan segala keberagamannya, sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Republik Indonesia. RUU ini memberikan kejelasan status dan kepastian hukum dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

RUU tentang Desa mengatur masa jabatan Kepala Desa dan alokasi anggaran/keuangan desa. Kedua materi ini sempat dibahas secara intensif melalui konsultasi-konsultasi, dan *alhamdulillah* telah memperoleh kesepakatan bersama. Masa jabatan Kepala Desa disetujui selama 6 (enam) tahun dan dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan. Khusus mengenai besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa, ditentukan sebesar 10% yang dihitung dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) dalam APBN, yang diberikan secara bertahap. Besarnya alokasi anggaran yang bersumber dari APBN, dimaksudkan untuk mengefektifkan program pembangunan yang berbasis desa secara merata dan berkeadilan. Besarnya dana desa untuk setiap desa tidak sama, disesuaikan dengan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Dana ini harus dipertanggungjawabkan oleh desa kepada kabupaten/kota dengan mekanisme pertanggungjawaban yang diatur melalui Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya, RUU tentang Aparatur Sipil Negara adalah RUU inisiatif DPR. RUU ini akan memperbaiki sistem dan model baru dalam rangka penataan birokrasi pemerintahan, menuju birokrasi yang mampu melayani masyarakat. Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berbasis pada manajemen sumber daya manusia, mengembangkan potensinya sebagai modal, dengan menerapkan sistem karier terbuka. Arah kebijakan Aparatur Sipil Negara sebagai profesi, menekankan pada rekrutmen calon pegawai terbaik, berbasis kompetensi, pengembangan profesionalitas, promosi secara terbuka dan kompetitif dengan jaminan pensiun yang memadai.

## **Sidang Dewan yang terhormat,**

Kita sangat paham, bahwa jabatan notaris merupakan jabatan penting yang menjalankan profesi dalam memberikan jasa hukum kepada masyarakat berupa pembuatan akta autentik. UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat, sehingga perlu dilakukan perubahan, dan DPR telah memprakarsai terbentuknya UU tersebut.

Berikutnya RUU tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan amanah dalam melaksanakan Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 3/PUU-VIII/2010. RUU ini mengatur tentang izin lokasi dan izin pengelolaan dalam pemanfaatan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, sehingga dapat memberikan kewenangan dan tanggung jawab negara secara memadai atas pengelolaan perairan pesisir dan pulau kecil, sehingga beberapa pasal perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan hukum di masyarakat.

RUU tentang Perindustrian bertujuan untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional, kekuatan struktur industri, mandiri, berdaya saing, dan maju serta industri hijau, kepastian berusaha, persaingan yang sehat. RUU ini mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat. RUU ini juga membuka kesempatan berusaha, dan perluasan kesempatan kerja dan pemerataan pembangunan industri, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, secara berkeadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sebagai pedoman bagi pemerintah dan pelaku industri, dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Adapun pembahasan Dewan terhadap Perppu No. 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas UU No 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, baru saja diputuskan dalam rapat paripurna. Pimpinan Dewan menghormati keputusan tersebut.

Berkaitan dengan Prolegnas 2014, beberapa hari yang lalu, rapat paripurna juga telah menyetujui 66 (enam puluh enam) RUU Prioritas yang masuk dalam Prolegnas tahun 2014. Sejumlah RUU tersebut adalah lanjutan dari RUU Prioritas tahun 2013 yang belum

dapat diselesaikan. Oleh karenanya, Dewan menaruh harapan bahwa RUU Prioritas tahun 2014 menjadi perhatian serius dan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam kaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran, Dewan mengevaluasi pelaksanaan APBN 2013. Dewan mencermati rencana implementasi APBN 2014. Beberapa hari lalu, DIPA 2014 telah diserahkan Presiden kepada seluruh kementerian dan lembaga negara, serta 34 (tiga puluh empat) Gubernur di seluruh Indonesia. Dewan sepakat dengan Presiden, bahwa implementasi dari APBN 2014 harus dilaksanakan tepat waktu, tepat sasaran, transparan dan akuntabel.

Permasalahan klasik yang senantiasa berulang di setiap tahun anggaran adalah lambatnya penyerapan anggaran dan penumpukan penyerapan di akhir tahun. Belanja Kementerian/Lembaga telah menghasilkan pola belanja dengan karakteristik penyerapan yang rendah di semester pertama dan menumpuk pada akhir tahun anggaran berjalan. Pola penyerapan anggaran ini tidak hanya terjadi di Pusat, akan tetapi juga terjadi di Daerah, sehingga mengganggu rencana kinerja kebijakan APBN terhadap perekonomian nasional. Hal ini juga berdampak pada pencapaian target pertumbuhan ekonomi, penyerapan tenaga kerja, dan pengentasan kemiskinan, yang menjadi sasaran kebijakan fiskal.

Dinamika perekonomian secara eskternal, dan sentimen negatif pasar dalam negeri terhadap defisit neraca transaksi berjalan, terus menekan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Volatilitas nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, dikhawatirkan dapat berlangsung sampai tahun fiskal 2014. Pimpinan Dewan mencermati, bahwa merosotnya nilai tukar rupiah sampai pada titik terendah dalam rentang waktu empat tahun terakhir, akan membawa dampak ikutan berupa ketidakcocokan realisasi terhadap indikator-indikator asumsi dasar yang menjadi acuan perhitungan besaran pendapatan, belanja dan pembiayaan anggaran tahun anggaran 2014.

Dalam kaitan ini, Pimpinan Dewan mendorong Otoritas Moneter dan Pemerintah, untuk lebih menguatkan sinergi dalam mengambil langkah-langkah taktis untuk menstabilkan nilai tukar, sehingga dapat mengurangi resiko negatif terhadap pelaksanaan APBN 2014.

Dewan berkeyakinan, langkah ini memiliki arti startegis dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan anggaran tahun 2014.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Pimpinan Dewan perlu mencermati kembali agenda nasional menyongsong liberalisasi perdagangan intra-ASEAN 2015 dalam rentang waktu satu tahun ke depan. Dewan mendorong Pemerintah untuk segera menyelesaikan beberapa “pekerjaan rumah” dalam menghadapi liberalisasi perdagangan ini, dan mampu mengambil manfaat ekonomis secara optimal, bukan sebaliknya, hanya menjadi pasar hasil produksi negara-negara ASEAN lainnya. Dewan mengingatkan kembali Pemerintah, bahwa sejumlah kebijakan dasar pengembangan sektor-sektor industri prioritas harus segera dituntaskan.

Isu pembangunan sektor pertanian, khususnya isu ketahanan pangan, juga patut kita renungkan kembali. Keputusan Konferensi WTO di Bali baru-baru ini, telah membuka ruang subsidi bagi sektor pertanian oleh Pemerintah negara-negara berkembang dalam rentang waktu empat tahun ke depan. Pimpinan Dewan memandang, bahwa isu ini menjadi semakin mendesak untuk diperhatikan Pemerintah, ketika impor pangan nasional tetap tidak dapat dibendung, sementara pada saat yang sama, tingkat konversi lahan pertanian menjadi non-pertanian terus berlangsung.

Untuk itu, dalam rangka ketahanan pangan nasional, Pimpinan Dewan memandang bahwa kebijakan pengendalian konversi lahan, penguatan subsidi pangan, benih, dan pupuk, harus terus ditingkatkan. Kebijakan pengurangan subsidi energi patut terus didukung, sehingga beban subsidi untuk sektor pertanian dan sektor-sektor strategis lainnya, mendapat porsi yang proporsional.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Beberapa hari yang lalu, Rapat Paripurna Dewan telah mendengarkan laporan kinerja beberapa Tim Pengawas yang telah dibentuk oleh DPR RI, yaitu (1) Tim Pemantau DPR-RI Terhadap Pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan pelaksanaan UU No. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua; (2) Tim Pengawas Penyelesaian Sengketa Pertanahan dan Konflik Agraria; dan (3) Tim Pengawas

Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Semua tim ini masih perlu diperpanjang penugasannya.

Adapun laporan kinerja Tim Pengawas Century tahun 2013 yang baru saja kita dengar, disepakati untuk diperpanjang masa tugasnya sampai dengan Masa Sidang akhir Masa Bhakti DPR 2009-2014. Walaupun telah bekerja optimal melakukan rapat-rapat tiap pekan, namun karena banyaknya permasalahan yang masih perlu digali, maka tim ini perlu melanjutkan tugasnya.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Dalam hal penegakan hukum, bersamaan dengan momentum Hari Anti Korupsi Internasional yang jatuh pada tanggal 9 Desember lalu, Dewan mengajak seluruh elemen bangsa, untuk terus berjuang dalam memberantas korupsi. Dewan mengapresiasi dan mendukung sepenuhnya setiap langkah pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilaksanakan oleh seluruh lembaga penegak hukum, meskipun perilaku korup terus saja terjadi, termasuk yang melibatkan oknum aparat penegak hukum.

Dewan ingin menyampaikan, bahwa penghargaan yang diterima DPR-RI dari KPK pada peringatan Hari Anti-Korupsi Internasional tahun 2013, **sebagai lembaga yang paling banyak melaporkan gratifikasi**, merupakan salah satu bukti komitmen Dewan, untuk terus melawan perilaku korupsi.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Berbagai permasalahan mendasar dalam tingkat nasional maupun dalam rangka implementasi UU yang telah dihasilkan DPR dan pemerintah, telah mendapatkan perhatian utama. Dilandasi amanat UUD NRI tahun 1945, UU No. 40 tahun 2004, tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan UU No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS), kita akan memiliki dua badan penyelenggara jaminan sosial, yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, sebagai badan hukum publik yang ditugaskan negara untuk menyelenggarakan program jaminan sosial. BPJS Kesehatan lebih awal memulai kegiatan operasionalnya, yaitu pada tanggal 1 Januari

2014. Oleh karena itu, Pemerintah harus segera menyusun peraturan perundang-undangan terkait implementasi BPJS Kesehatan sesuai amanat UU tentang BPJS.

Disahkannya UU tentang BPJS beserta penyusunan berbagai peraturan teknis pendukung, merupakan jalan menuju terwujudnya sistem jaminan sosial nasional yang layak bagi seluruh rakyat. Perlu disadari, bahwa proses tersebut bukan merupakan hal yang mudah, bahkan dapat dipastikan masih banyak tantangan dan hambatan yang harus dihadapi. Oleh karena itu, DPR yang memiliki fungsi pengawasan, akan terus mendorong dan mengawasi pemerintah dan pemangku kepentingan sehingga program Sistem Jaminan Sosial Nasional dapat dilaksanakan dengan baik.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Musim haji tahun ini DPR mengirimkan 2 (dua) tim ke Arab Saudi untuk melakukan fungsi pengawasan yaitu tim yang dikirim pada tahap persiapan dan pada tahap pelaksanaan. Secara umum penyelenggaraan haji tahun ini sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, meskipun ada permasalahan yang selanjutnya direkomendasi untuk perbaikan tahun depan. Rekomendasi dari aspek legislasi, perlu ada perubahan terhadap UU No. 13 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, yang harus diperjelas dalam pengaturan kewenangan antara regulator dan operator dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam aspek pengawasan, perlu pendekatan Pemerintah dengan Pemerintah, untuk lebih mengoptimalkan pelayanan jamaah haji, antara lain dalam hal perluasan Mina, serta upaya pembangunan pelayanan kesehatan setingkat rumah sakit. Hasil dari Tim Pengawas ini perlu ditindaklanjuti oleh Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan lembaga terkait lainnya.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada Masa Sidang ini, DPR juga memberikan pertimbangan terhadap calon anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Periode 2013-2016. Pertimbangan diberikan kepada 9 (sembilan) calon yang telah memenuhi kualifikasi dan kompetensi. Mereka telah mewakili unsur Pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi sosial, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha dan

kelompok masyarakat peduli anak. Pemberian pertimbangan ini segera ditindaklanjuti untuk disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.

Selain itu, Dewan juga telah memberikan pertimbangan terhadap 11 (sebelas) calon duta besar negara sahabat dari Armenia, Ekuador, Bulgaria, Zambia, Slowakia, Siera Leone, Oman, Pakistan, Nigeria, Guinea Bissau, dan San Marino.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Sebagaimana yang telah saya sampaikan dalam pidato pembukaan yang lalu, Dewan melalui Komisi I, mendukung langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Pemerintah terkait dengan kasus penyadapan. Dewan kembali mengapresiasi langkah Pemerintah dengan mensyaratkan terpenuhinya 6 (enam) langkah dalam *roadmap* terhadap hubungan dengan Australia, dalam kerangka upaya pemulihan hubungan kedua negara pasca pernyataan penyesalan Perdana Menteri Australia Tony Abbott di Parlemen pada tanggal 20 November 2013, dan pada pertemuan Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa dan Menteri Luar Negeri Australia Julie Bishop di Jakarta tanggal 5 Desember 2013 yang lalu.

Dewan memandang penting diperlukannya ketegasan serta kejelasan aturan antara Indonesia dan Australia terkait upaya perolehan informasi yang akurat terhadap berbagai isu. Oleh karena itu, Dewan mendukung rencana pembahasan protokol dan kode etik hubungan kedua negara sebagai bentuk solusi pemulihan hubungan kedua negara yang sempat tercederai akibat kasus ini.

Masih terkait dengan politik luar negeri Indonesia khususnya dalam hal konflik Azerbaijan-Armenia, Pimpinan Komisi I telah mendiskusikannya dengan memperhatikan hasil Konferensi ke-7 PUIC di Palembang, kunjungan Ketua DPR RI ke Azerbaijan April tahun ini, dan kajian diskusi publik, maka Pimpinan DPR berpandangan bahwa Dewan mendukung kedaulatan dan keutuhan wilayah Republik Azerbaijan. Indonesia mendukung prinsip penghormatan terhadap integritas wilayah dan batas wilayah yang diakui secara internasional, mendukung proses penyelesaian masalah Nagorno Karabakh secara damai berdasarkan 4 resolusi Dewan Keamanan PBB dan mendorong perundingan damai dalam kerangka *Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) Minsk Group*. Juga,

menyatakan keprihatinan yang mendalam atas tragedi pembunuhan massal di kota Khojali.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Diplomasi parlemen juga ditangani secara efektif oleh Dewan selama masa sidang ini, baik dalam *international event*, pengiriman delegasi muhibah maupun bilateral, dan penerimaan delegasi parlemen luar negeri. Untuk *international event*, DPR-RI bersama IPU (*Inter-Parliamentary Union*), telah menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konferensi Parlemen mengenai Organisasi Perdagangan Dunia (*Parliamentary Conference on World Trade Organization – PC WTO*) di Bali pada tanggal 2 dan 5 Desember 2013. Konferensi ini diselenggarakan di sela-sela Konferensi Tingkat Menteri Organisasi Perdagangan Dunia yang ke-9 (*9<sup>th</sup> Ministerial Conference on World Trade Organization – MC9*), tanggal 3-7 Desember 2013.

Pada forum PC WTO tersebut, delegasi Parlemen India tidak hadir, terkait dengan kerasnya sikap negara itu menentang penghapusan total atas subsidi keamanan pangan dan kebijakan penimbunan pangan untuk menjaga stabilitas stok dan harga pangan domestik. Dalam konferensi ini, masing-masing delegasi memberikan pandangan terkait dengan sikap negara masing-masing, baik yang bersikap pesimis, optimis, kritis, maupun pro-kontra dengan sikap India.

Dewan mengapresiasi usaha Pemerintah untuk memperjuangkan Paket Bali yang akhirnya disepakati bersama pada Penutupan Forum PC WTO tanggal 7 Desember 2013. Paket Bali yang terdiri dari 10 (sepuluh) dokumen ini, memberikan ruang dan fleksibilitas bagi negara berkembang untuk mengatur kebijakan ketahanan pangannya. Dewan pun akan mendukung upaya Pemerintah untuk meningkatkan daya saing pertanian, ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan petani.

Masih terkait dengan diplomasi parlemen, berbagai delegasi telah menghadiri berbagai *parliamentary meeting* di beberapa negara, antara lain, Sidang *Asian Parliamentary Assembly* di Pakistan. Delegasi dipimpin oleh Ketua BKSAP. Para delegasi dari DPR RI hadir dalam 3 komisi, yaitu Komisi Politik Keamanan, Komisi Sosial Budaya, Komisi Ekonomi-Pembangunan Berkelanjutan serta Energi. Pada sidang APA kali ini, delegasi

DPR-RI berharap adanya peningkatan efektifitas dalam setiap sidang APA sehingga semakin terbangun kebersamaan di antara anggota APA.

### **Sidang Dewan yang terhormat,**

Beberapa waktu yang lalu, DPR-RI menerima tamu resmi dari Parlemen Ekuador. Dalam pertemuan dengan BKSAP DPR-RI, kedua Parlemen bertukar pandangan mengenai proses demokratisasi, baik yang terjadi di Indonesia maupun di Ekuador, yang memiliki beberapa kesamaan. Kedua parlemen mengharapkan, hubungan kedua parlemen dan kedua negara dapat ditingkatkan dengan memberikan peran kepada masing-masing grup persahabatan untuk saling berkunjung dan bertukar pandangan. DPR-RI berharap, Ekuador memegang peran penting di negara-negara Latin Amerika, dan membantu penguatan kerjasama Selatan-Selatan yang telah dicanangkan bersama. Delegasi Ekuador memandang penting kerjasama ini, karena Indonesia adalah mitra strategis, terutama dalam kerjasama di bidang industri tekstil.

Pada bulan November dan awal Desember yang lalu, telah dilakukan kunjungan muhibah DPR-RI ke Republik Islam Iran dipimpin Ketua DPR RI. Pada kesempatan tersebut, delegasi telah berdialog dengan Presiden Dr. Hassan Rouhani dan Ketua Parlemen Dr. Ali Larijani terhadap berbagai isu, antara lain harapan Dewan agar pemerintah Iran dapat mendorong peningkatan kerjasama perdagangan dan investasi dengan Indonesia, serta dukungan dari Dewan atas kepemimpinan Iran dalam Gerakan Non-Blok Periode 2012-2015 dan berbagai organisasi internasional lain. Keinginan Indonesia agar ditingkatkan program kerjasama beasiswa dan pariwisata di antara kedua negara. Wakil Ketua DPR RI/Korpolkam juga memimpin kunjungan muhibah ke Hongaria atas undangan *National Assembly* Hongaria. Kunjungan ini ditujukan untuk menjajaki kerja sama bidang pertahanan, implementasi komitmen pemberian beasiswa dan melakukan *comparative study* terkait kebijakan sistem jaminan sosial (BPJS). Adapun Wakil Ketua DPR RI/Korinbang telah melakukan kunjungan ke Jerman dan Belgia, yang tergabung dalam delegasi AIPA dalam rangka meningkatkan hubungan kerja sama antara AIPA dengan Parlemen Eropa.

Pada kesempatan ini, DPR-RI atas nama Rakyat Indonesia menyatakan duka cita mendalam atas wafatnya Nelson Rolihlahla Mandela. Seorang pahlawan pejuang anti

rasialisme global yang sangat dicintai, tidak hanya oleh rakyatnya tapi juga oleh dunia. wafatnya Mandela mengingatkan kita bahwa tidak ada jalan mudah untuk mencapai kemerdekaan. Hidupnya telah menjadi inspirasi dunia tentang persamaan hak, harkat dan martabat manusia. Semoga arwahnya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin.

**Sidang Dewan yang terhormat,**

Pada bagian akhir pidato penutupan, Pimpinan Dewan meminta perhatian terhadap datangnya musim penghujan. Musim hujan akan mendatangkan banjir dan longsor, dan dampak lebih lanjut adalah timbulnya berbagai penyakit. Pemerintah Daerah dan lembaga terkait harus siap dengan sarana dan prasarana untuk mengantisipasi bila terjadi bencana banjir. Oleh karenanya, kewaspadaan harus ditingkatkan.

Kita akan menutup tahun 2013, dimana di penghujung tahun ini, kita akan memasuki liburan sekolah, Hari Natal, dan Tahun Baru 2014. Untuk itu, Dewan mendorong Pemerintah untuk mengawal momentum tersebut secara optimal, baik berkaitan dengan ketersediaan bahan pokok, kesiapan transportasi, serta kenyamanan dan keamanan.

Pimpinan Dewan mengucapkan Selamat Natal bagi Umat Kristiani, serta Selamat Tahun Baru 2014 bagi seluruh anggota Dewan dan Rakyat Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, amin.

***Wassalamu'alaikum Warahmatullahiwabarakatuh.***

Jakarta, 19 Desember 2013

**KETUA  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**Dr. H. Marzuki Alie**